



PROSPEK KEARIFAN LOKAL BUDAYA MASYARAKAT JAWA DALAM PERSPEKTIF PENANGANAN KONFLIK DAN KEKERASAN SOSIAL ANTAR PERGURUAN PENCAK SILAT DI WILAYAH MADIUN

FX. Sudjatmoko¹⁾, Hery Hermawan²⁾

¹⁾ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Madiun

²⁾ Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Madiun

Email: fxsudjatmoko@unmer-madiun.ac.id

Abstrak

Dilatarbelakangi oleh adanya konflik antar perguruan pencak silat di kabupaten Madiun yang sampai saat ini belum mampu terselesaikan secara tuntas dan permanen, bahkan konflik ini telah mengundang perhatian dari pimpinan Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) kabupaten Madiun dan Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Timur untuk menerjunkan anggotanya dalam mengantisipasi terjadinya konflik pada momen hari besar seperti perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (SH. Terate) dan perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda (SH. Winongo), yaitu 'Suro Agung' karena telah mengarah pada potensi timbulnya keresahan sosial dan ketidaknyamanan bagi masyarakat pada umumnya. Untuk itu, tujuan penelitian dimaksudkan membantu pemerintah daerah kabupaten Madiun dalam menciptakan harmoni sosial atau kerukunan dan keamanan sosial, yakni tersedianya sebuah model/pendekatan rekonsiliasi penanganan konflik antar perguruan pencak silat di kabupaten Madiun. Model/pendekatan dimaksud, melalui pengembangan nilai-nilai lokal budaya masyarakat Jawa di propinsi Jawa Timur. Subyek yang menjadi responden, meliputi: Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) kabupaten Madiun, pengurus dan anggota perguruan silat, dan masyarakat. Sedangkan penentuan responden didasarkan pada tehnik "Snowball Sampling". Tehnik pengumpulan data yang digunakan; a) observasi langsung di tempat penelitian; b) interview; c) kuesioner; dan d) dokumentasi. Sedangkan untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan "model analisa interaktif", adalah analisis dilakukan dalam bentuk interaksi pada tiga komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

Kata Kunci: Perguruan Pencak Silat, Harmoni Sosial, Konflik, Dan Budaya Lokal

Abstract

Motivated by the conflict between martial arts schools in Madiun district which until now has not been able to be resolved completely and permanently, even this conflict has invited the attention of the leaders of the Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) of the district of Madiun and the Kepolisian Daerah (POLDA) of East Java to send its members in anticipating the occurrence of conflicts during big days such as the Pencak silat college of the Setia Hati Terate Brotherhood (SH. Terate) and the Pencak silat college of the Setia Hati Brotherhood Winongo Tunas Muda (SH. Winongo), namely 'Suro Agung' because it has led to the potential for social unrest and inconvenience to society at large. For this reason, the research objective is intended to assist the local government of Madiun district in creating social harmony or social security and harmony, namely the availability of a model / approach for reconciliation in handling conflicts between pencak silat schools in Madiun district. The model / approach is intended, through the development of local cultural values of



the Javanese people in the province of East Java. Subjects that became respondents included: Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) of Madiun Regency, administrators and members of the Silat College, and the community. While the determination of respondents is based on the technique "Snowball Sampling". Data collection techniques used; a) direct observation at the research site; b) interview; c) questionnaire; and d) documentation. Meanwhile, to test the validity of the data using triangulation of data sources. Data processing and analysis are carried out qualitatively using "interactive analysis models", which are analyzes conducted in the form of interactions on three components, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification.

Keywords: Pencak Silat College, Social Harmony, Conflict, and Local Culture

I. PENDAHULUAN

Penelitian ini difokuskan pada usaha mewujudkan harmoni sosial dalam penanganan konflik perguruan pencak silat dan kekerasan sosial melalui kearifan lokal budaya masyarakat Jawa. Konflik antar perguruan silat di kabupaten Madiun telah menimbulkan keresahan sosial, dan bahkan telah mengarah pada kekerasan secara massal. Konflik antara dua perguruan pencak silat, yaitu antara Persaudaraan Setia Hati Terate (*SH. Terate*) dengan Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda (*SH. Winongo*) telah berlangsung lama, dan sampai saat ini belum dapat terselesaikan secara tuntas. Konflik oleh adanya perbedaan gagasan dan kepentingan yang berakibat benturan, yaitu terjadi saling ingin merebut kekuasaan dan kewenangan di lingkungan masyarakat.

Dalam perspektif ini, konflik antar perguruan pencak silat yang terjadi di wilayah Madiun dikarenakan adanya kepentingan masing-masing kelompok melalui cara-cara menunjukkan pengaruh dan kekuatan secara fisik di lingkungan masyarakat. Ada kelompok yang merasakan ancaman dari kelompok yang lain melalui upaya menunjukkan eksistensinya dalam kehidupan sosial, dan ada yang merasakan bahwa pengaruh dan kekuasaannya tersaingi oleh kelompok yang lainnya. Konflik yang terjadi antar perguruan pencak silat tersebut, apabila tidak ada upaya untuk

menyelesaikannya, maka dimungkinkan berkembang menjadi bentuk kekerasan sosial dan mengakibatkan ancaman bagi kenyamanan kehidupan bermasyarakat.

Dalam pandangan Robert Audi, kekerasan sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang, atau serangan, penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang secara potensial dapat menjadi milik seseorang (Setiadi dan Kolip, 2010: 358). Oleh karena itu dalam penelitian ini difokuskan pada usaha mencermati dan menelaah secara mendalam dan komprehensif pada beberapa aspek pemasalahan, yaitu: 1) Melakukan identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antar perguruan pencak silat di wilayah Madiun dan kaitannya dengan efektifitas penanganan konflik perguruan pencak silat selama ini; 2) Merancang pendekatan rekonsiliasi dalam penanganan konflik perguruan pencak silat dan kekerasan sosial; dan 3) Merancang model harmoni sosial dalam perspektif kearifan lokal budaya masyarakat Jawa bagi penanganan konflik dan kekerasan sosial.

Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah khususnya kabupaten Madiun dalam menciptakan harmoni sosial atau kerukunan dan keamanan sosial, yakni tersedianya sebuah pendekatan bagi penanganan konflik antar perguruan pencak silat di wilayah Madiun,



melalui pengembangan nilai-nilai kearifan lokal budaya masyarakat Jawa di propinsi Jawa Timur. Di samping itu, penelitian ini ditujukan pula untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan IPTEK, yakni: a. Menambah perbendaharaan dan memperkuat khasanah keilmuan di bidang Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), utamanya bagi pengembangan teori sosial (*Social Theory*); b. Diperoleh hipotesa dalam studi sosiologi tentang hubungan konflik sosial terhadap kekerasan sosial; c. Diperoleh sebuah rancangan pendekatan rekonsiliasi dalam penanganan konflik antar perguruan pencak silat dan kekerasan sosial; dan d. Diperoleh sebuah rancangan model harmoni sosial dalam perspektif kearifan lokal budaya masyarakat Jawa bagi penanganan konflik dan kekerasan sosial.

II. KAJIAN LITERATUR

Kajian yang berkenaan dengan keterlibatan birokrasi dalam proses politik, telah banyak dilakukan dengan beberapa kasus yang terjadi di daerah-daerah. Beberapa peneliti yang telah melakukan kajian, antara lain: Soebijantoro, Abraham Nurcahyo, dan Yudi Hartono, judul: Rekonsiliasi Konflik Antar Perguruan Pencak Silat di Madiun (Studi Historis Sosiologis), menyimpulkan bahwa; Konflik antar perguruan pencak silat di kabupaten Madiun telah sampai pada fase latensi dimana perbedaan yang ada dapat diterima. Perbedaan pandangan tersebut mencerminkan dinamika internal perguruan yang masih dalam batas kewajaran. Rekonsiliasi dengan pendekatan kultural menjadi penting dilakukan dan pendekatan keamanan mulai dikurangi. Arena-arena integrasi seperti Festival Pencak Seni Tradisi dapat diberdayakan sebagai media rekonsiliasi dengan pendekatan kultural. Pendekatan kultural ini terlebih dahulu dilakukan dengan transformasi kesadaran melalui upaya-upaya pemaafan terhadap

masa lalu untuk memperbaiki hubungan. Dari situ rekonsiliasi kultural dapat menjadi pilihan yang lebih memberi harapan. (*Sumber: dokumen.tips > Documents*, diakses tanggal 10 Mei 2016).

Kemudian, Rindra Sulistiyono, judul: Persepsi Masyarakat terhadap konflik antar oknum Perguruan Pencak Silat di kabupaten Madiun (Studi Kasus Mengenai Konflik yang melibatkan Oknum dari Perguruan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate dan Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo di kabupaten Madiun Tahun 2013), dengan kesimpulan: bahwa konflik yang melibatkan oknum dari Perguruan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate dan Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda di kabupaten Madiun memunculkan persepsi yang beragam dari masyarakat. Terbaginya persepsi masyarakat ini disebabkan oleh faktor komunikasi yang belum berjalan selaras, sehingga menimbulkan prasangka (ketidaktahuan) yang berbuah tanda tanya, desas-desus dan kecurigaan, sehingga pelabelan terhadap kelompok yang sering melakukan konflik belum sepenuhnya hilang. Perasaan was-was, dan tidak nyaman masih dirasakan masyarakat sebagai dampak dari konflik. Keadaan *antagonistik* pun masih kuat terasa pada masyarakat di tataran bawah, terutama ketika agenda masing-masing perguruan pencak silat di bulan Suro ini tiba. Menindaklanjuti hal ini, pihak perguruan silat, pemerintah maupun aparat keamanan telah berusaha melakukan upaya pembinaan, ikrar, koordinasi, pengamanan, dan kemudian mengusulkan *rebranding* kabupaten menjadi “Madiun Kampung Pesilat”.

(*Sumber: muhfaishalf.blogspot.com/.../melac*



ak-akar-konflik-antar-perguruan.htm,
diakses tanggal 10 Mei 2016).

Dalam pandangan Setiyadi dan Kolip (2010: 348), secara sederhana konflik dapat diartikan sebagai perselisihan atau persengketaan antara dua atau lebih kekuatan, baik secara individu ataupun kelompok dimana masing-masing pihak memiliki keinginan untuk saling menjatuhkan atau menyingkirkan atau mengalahkan atau menyingkirkan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (1993), konflik merupakan suatu proses sosial dimana orang per orang atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman penggunaan kekerasan atau kekerasan itu sendiri. Konflik tidak hanya berlangsung untuk mempertahankan eksistensinya saja, melainkan juga untuk membinasakan eksistensi orang atau kelompok lain yang dianggap sebagai pesaing atau lawan.

Dalam pandangan para sosiolog, bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial, dan kekuasaan (*power*) yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat (Setiyadi dan Kolip, 2010: 360). Konflik antar perguruan pencak silat di wilayah Madiun, juga dipicu oleh perebutan kekuasaan dan pengaruh di dalam masyarakat. Di satu pihak, ditemui adanya perguruan pencak silat yang berupaya untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh di tengah-tengah masyarakat, sementara di lain pihak, perguruan pencak silat yang telah

berpengaruh di dalam masyarakat merasakan adanya ancaman dari kelompok perguruan pencak silat lainnya, dengan pergerakan yang dilakukan tersebut.

Sebenarnya, jika ditelusuri akar penyebab konflik antar perguruan pencak silat di wilayah Madiun tersebut, tidak dapat terlepas dari konflik individu yang disebabkan adanya perbedaan gagasan, tujuan, keinginan, dan pendirian atas keberlangsungan dari sebuah perguruan pencak silat. Pada awalnya konflik dua perguruan pencak silat di wilayah Madiun, antara Persaudaraan Setia Hati Terate (*SH. Terate*) dan Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda (*SH. Winongo*) merupakan satu perguruan pencak silat, karena adanya perbedaan gagasan dan kepentingan terkait dengan keberlangsungan perguruan pencak silat, dan karena tidak tercapai kesepakatan atas perbedaan tersebut, maka masing-masing mendirikan perguruan pencak silat sebagaimana disebutkan. Adapun yang menjadi persoalan dalam keadaan tersebut, adalah bagaimana konflik sosial yang terjadi dapat diselesaikan dan tidak berujung pada kekerasan sosial dengan akibat terganggunya keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat pada umumnya. Perilaku kekerasan, diawali dari perilaku individu dan/atau kelompok, dimana faktor individu disebabkan oleh adanya karakter atau kepribadian yang agresif dan dilakukan baik sifatnya spontan maupun dengan sadar direncanakan, secara sendiri atau bersama-sama.

Kekerasan lebih bersifat penghacuran secara fisik, dan tidak jarang dalam realitas sosial menimbulkan kematian atau penghilangan nyawa orang lain. Lebih lanjut



dalam kesimpulan Setiyadi dan Kolip (2010: 358-359) terdapat dua indikasi pengertian kekerasan, sebagai berikut; 1) Kekerasan dalam arti sempit menunjuk pada tindakan yang berupa serangan, perusakan, penghancuran terhadap diri (fisik) seseorang maupun milik atau sesuatu yang secara potensial menjadi milik orang lain. Dengan demikian kekerasan menunjuk pada tindakan fisik yang bersifat personal, artinya mengarah pada orang atau kelompok tertentu yang dilakukan secara sengaja, langsung, dan actual; dan 2) Kekerasan dalam arti luas, menunjuk pada tindakan fisik maupun tindakan psikologis, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, personal atau struktural. Yang dimaksud dengan kekerasan secara struktural adalah kekerasan yang terjadi di dalam struktur sosial, seperti penindasan yang dilakukan oleh negara yang otoriter, sistem yang membuat kehidupan sosial tidak adil, dan sebagainya.

Kekerasan bermula dari adanya konflik individu atau kelompok yang disebabkan oleh adanya kepentingan yang berbeda, dan karena tidak adanya kesepakatan untuk menyelesaikan konflik akhirnya dapat mengarah pada bentuk kekerasan secara fisik. Teori Deprivasi Relatif, mengungkapkan ada lima tahapan yang menyertai munculnya kekerasan, yaitu sebagai berikut; a) Situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kerusuhan atau kekerasan akibat struktur sosial tertentu, seperti tidak adanya saluran yang jelas dalam masyarakat, tidak adanya media untuk mengungkapkan aspirasi-aspirasi, dan

komunikasi antar mereka; b) Kejengkelan atau tekanan sosial, yaitu kondisi karena sejumlah besar anggota masyarakat merasa bahwa banyak nilai-nilai dan norma yang sudah dilanggar; Berkembangnya prasangka kebencian yang meluas terhadap suatu sasaran tertentu; c) Sasaran kebencian ini berkaitan dengan faktor pencetus, yaitu peristiwa tertentu yang mengawali atau memicu suatu kerusuhan; d) Mobilisasi massa untuk beraksi, yaitu adanya tindakan nyata dari massa dan mengorganisasikan diri mereka untuk bertindak. Tahap ini merupakan tahap akhir dari akumulasi yang memungkinkan pecahnya kekerasan massa. Sasaran aksi ini bisa ditujukan kepada pihak yang memicu kerusuhan, atau di sisi lain dapat dilampiaskan pada objek lain yang tidak ada hubungannya dengan pihak lawan tersebut; dan e) Kontrol sosial, yaitu kemampuan aparat keamanan dan petugas untuk mengendalikan situasi dan menghambat kerusuhan. Semakin kuat kontrol sosial, semakin kecil kemungkinan untuk terjadi kerusuhan (*rudidw.blogspot.com/2012/09/teori-kekerasan.html*, diakses tanggal 9 Juni 2016).

Pada umumnya, konflik sosial dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan, artinya konflik sosial tidak dapat dihindari maka yang menjadi persoalan bagaimana pengelolaan konflik sosial agar tidak mengarah pada bentuk kekerasan sosial. Dalam pandangan Dahrendorf, bahwa konflik tidak dapat diselesaikan, artinya konflik akan menjadi pertentangan antara tesis dan anti-tesis yang akan menghasilkan sintesis, namun pada gilirannya sintesis ini akan menjadi tesis kembali yang



menghadapi antitesis sehingga melalui mekanisme pengaturan konflik baru yang berupa rekonsiliasi akan muncul sintesis baru (Setiyadi dan Kolip, 2010: 386). Pengaturan konflik dengan rekonsiliasi melalui lembaga-lembaga yang dapat memberi kemungkinan terjadinya pola diskusi dan pengambilan keputusan dari pihak-pihak yang terlibat konflik, menurut Dahrendorf dinyatakan bahwa pengaturan konflik melalui rekonsiliasi akan berjalan efektif, jika memenuhi 4 (empat) faktor berikut; a) Lembaga-lembaga tersebut harus bersifat otonom yang berkewenangan membuat keputusan tanpa campur tangan dari pihak luar; b. Kedudukan kelembagaan tersebut harus bersifat monopolistik, artinya lembaga itulah yang berfungsi mengatur konflik; c. Peranan lembaga-lembaga tersebut harus memiliki kekuatan mengikat, sehingga pihak-pihak yang sedang bersengketa merasa terikat kepada keputusan lembaga tersebut; dan d. Lembaga tersebut harus bersifat demokratis, artinya aspirasi dari pihak-pihak yang bertikai harus didengarkan dan diberikan kesempatan yang sama untuk menyatakan pendapat (Setiyadi dan Kolip, 2010: 386-387).

Masyarakat Jawa, menjunjung tinggi nilai-nilai harmoni sosial dengan upaya-upaya menghindari terjadinya konflik dalam hubungan sosial merupakan “*ugeman*” (pedoman) seperti dikemukakan oleh Endraswara (2003), bahwa; orang Jawa cenderung untuk menghindari konflik yang terbuka serta keinginan untuk selalu menjaga harmoni, sehingga jarang muncul konflik terbuka pada level intra kelompok (Humanitas, Vol. IX No.1 Januari 2012). Lebih lanjut, konsep mewujudkan suatu

harmonis dengan lingkungannya tersebut, oleh orang Jawa dinamakan sebagai ‘*memayu hayuning bawono*’ (menjaga kelestarian alam), yaitu merupakan watak dan perilaku yang senantiasa berusaha mewujudkan keselamatan dunia, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Di dalam pandangan tersebut, dinyatakan bahwa motivasi manusia dalam melakukan tindakannya tidak hanya mendasarkan pada kepentingan individual, tetapi juga memperhatikan kepentingan kelompok atau masyarakat pada umumnya. Budaya masyarakat Jawa mengajarkan untuk selalu menghindari sikap ‘*iri, dengki, jail*’ (sikap tidak suka) dan selalu berupaya untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Lebih lanjut Magnis Suseno (2001), menjelaskan bahwa: ada dua segi yang perlu diperhatikan di dalam tuntutan kerukunan; *Pertama*, dalam pandangan Jawa masalahnya bukan penciptaan keadaan keselarasan sosial, melainkan lebih untuk tidak mengganggu keselarasan yang diandaikan sudah ada. Dalam perspektif Jawa ketenangan dan keselarasan sosial merupakan keadaan normal yang akan terdapat dengan sendirinya selama tidak diganggu. Prinsip yang mengikuti segi yang pertama ini adalah prinsip untuk mencegah segala cara kelakuan yang bisa mengganggu keselarasan dan ketenangan dalam masyarakat. Rukun berarti berusaha untuk menghindari pecahnya berbagai bentuk konflik. *Kedua*, prinsip kerukunan pertamanya tidak menyangkut suatu sikap batin atau keadaan jiwa, melainkan penjagaan keselarasan dalam pergaulan. Yang diatur adalah permukaan hubungan-hubungan sosial yang kentara, dalam arti lain yang perlu dicegah adalah konflik-konflik yang sifatnya terbuka. Di sisi lain, tuntutan kerukunan tersebut tidak meliputi pula sikap



batin melainkan agar keadaan yang tentram di dalam masyarakat tidak sampai terganggu (journal.uad.ac.id/index.php/HUMANITAS/article/download/348/pdf_2, diakses tanggal 14 Mei 2017).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Konflik; faktor dan akibatnya

Secara umum, konflik sosial bukan menjadi monopoli orang perseorangan ataupun antar kelompok di dalam masyarakat tertentu, tetapi konflik telah menjadi milik dan sangat sering menjadi pilihan-pilihan yang penting untuk ditetapkan. Memang benar, bahwa keadaan seperti itu selalu menjadi sebab yang paling besar bagi munculnya resiko jika benar-benar terjadi di lingkungan masyarakat luas, karena pihak-pihak yang telah memilih konflik sebagai bahasa ataupun cara dan alat di dalam upaya mewujudkan kehendak kompleks masing-masing, sehingga lingkungan dimana mereka hidup dan berkembang mengalami perubahan yang tidak nyaman atau tidak menggembirakan.

Meskipun tidak nyaman atau tidak menggembirakan yang diterima oleh lingkungan masyarakat bukan merupakan tujuan bagi pihak-pihak yang memilih konflik sebagai cara menunjukkan eksistensi seseorang terhadap seseorang yang lain atau antar kelompok. Keadaan dimaksud tidak menjadi perhitungan dan pertimbangan secara khusus sehingga menimbulkan kegaduhan yang sebelumnya tidak diperkirakan. Selanjutnya mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya konflik sosial di dalam masyarakat, harus dapat diketahui dan diupayakan untuk dilakukan pengendalian oleh lingkungan sosial masyarakat, agar kemungkinan terjadinya konflik dapat diminimalisasi. Perlu diketahui dan diakui juga, bahwa sadar atau tidak sadar serta sengaja atau tidak sengaja, konflik selalu ada di dalam lingkungan masyarakat, baik secara

sederhana ataupun secara besar-besaran, sehingga faktor-faktor penyebab terjadinya konflik ini harus dapat dikendalikan.

Kemudian daripada itu, timbul pertanyaan yakni; faktor-faktor penyebab seperti apa saja yang dapat menimbulkan konflik sosial di dalam masyarakat ? Bagaimana faktor-faktor tersebut melakukan proses sebagai penyebab konflik sosial ? Di dalam upaya memberikan jawaban pada pertanyaan-pertanyaan tersebut, diperlukan kajian lebih dalam tentang kehendak kompleks baik orang per orang maupun kelompok yang hidup dan tinggal di dalam lingkungan masyarakat. **Pertama;** Setiap individu manusia sangat menyadari bahwa kemampuan diri secara pribadi adalah sangat terbatas, tetapi manusia dihadapkan kepada tujuan yang tidak terbatas atau memiliki kehendak kompleks (keinginan, harapan, cita-cita, impian, tuntutan, kebutuhan, kepentingan, dan lain-lain yang sejenis). Namun demikian, setiap individu manusia juga dihadapkan kepada keadaan saling berlomba, bertanding, bersaing, dan tantangan-tantangan lain yang tidak mungkin dihindari sehingga dengan segala kemampuan yang bersifat terbatas tersebut, di sepanjang hidupnya harus selalu diperjuangkan dan memiliki sikap sebagai pejuang, dihadapi setiap saat oleh setiap individu manusia, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dan diikuti kehendak kompleksnya. **Kedua;** Setiap individu manusia juga memahami bahwa sejak lahir dirinya memiliki bekal pikiran, kehendak, dan akal budi sehingga berpeluang untuk bergerak secara leluasa di dalam menjalani hidupnya. Lebih tegasnya, adalah bahwa dengan bekal-bekal tersebut manusia sangat dimungkinkan untuk berupaya mewujudkan kehendak kompleks secara sendiri atau secara bersama, sehingga peluang yang tersedia dapat disikapi dan dihadapi dengan segala kemampuan yang dimiliki.



Permasalahan seperti itu, merupakan kekuatan penentu bahwa persaingan yang terjadi dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat tidak dapat dihindarkan, sehingga konflik sosial yang sering terjadi merupakan peristiwa yang bersifat manusiawi, dan tidak dapat dihindari. Memperhatikan ilustrasi seperti terungkap itu, dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat, antara lain sebagai berikut; a. Keterbatasan kemampuan, tetapi ditujukan kepada yang tidak terbatas pada setiap individu manusia; b. Setiap individu manusia memiliki bekal di dalam hidupnya seperti pikiran, kehendak, dan akal budi, bagi upaya mewujudkan kehendak kompleksnya (keinginan, harapan, cita-cita, impian, tuntutan, kebutuhan, kepentingan, dan lain-lain sejenisnya).; c. Setiap individu manusia berhadapan dengan perlombaan dan pertandingan yang berlangsung setiap saat, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama; dan d. Tantangan-tantangan lain di dalam kehidupan, sehingga persaingan tidak dapat dihindari.

Analisa Data Penelitian

Sesungguhnya konflik sosial di dalam masyarakat tidak perlu terjadi, terlebih meningkat ke arah kekerasan sosial sebagaimana telah diungkapkan, bahwa kekerasan sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik oleh seseorang terhadap seseorang yang lain, atau serangan, penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang secara potensial dapat menjadi milik seseorang. Hal tersebut, juga berlaku bagi kelompok-kelompok yang terhimpun di lingkungan masyarakat, mengingat akan resiko yang harus ditanggung sangat besar dimana konflik yang terjadi antar kelompok dengan melibatkan individu manusia dalam jumlah besar dapat mengarah pada kekerasan sosial, serta tidak dapat dikontrol oleh siapapun anggota kelompok masing-

masing maupun oleh warga masyarakat yang terkena akibat dari resiko kekerasan sosial.

Salah satu upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dimaksud, adalah melalui cara menerjunkan personil Kepolisian dalam mengantisipasi terjadinya konflik pada momen hari besar “*Suro Agung*” bagi kedua perguruan pencak silat tersebut, karena telah mengarah pada potensi timbulnya keresahan sosial dan rasa tidak nyaman bagi masyarakat pada umumnya. Konflik kepentingan, diakibatkan adanya benturan dua kepentingan yang berbeda, dimana satu pihak ingin merebut kekuasaan dan kewenangan di dalam masyarakat, di pihak lain terdapat kelompok yang berusaha mempertahankan dan mengembangkan kekuasaan dan kewenangan yang sudah ada di tangan mereka.

Persaingan secara wajar dan taat aturan, merupakan prinsip yang tentunya dapat diketahui dan disadari oleh masing-masing perguruan pencak silat berdasarkan janji serta sumpah bagi kesetiaan setiap anggota perguruan, demikian juga di dalam perlombaan atau pertandingan bagi upaya eksistensi perguruan silat. Artinya bahwa keberadaan perguruan pencak silat, di dalam upaya untuk dikenal dan berkembang di lingkungan masyarakat merupakan perjuangan oleh setiap perguruan melalui perlombaan dan pertandingan yang berlangsung secara wajar dan taat aturan, dan tentunya memperhatikan keamanan serta kenyamanan lingkungan dimana perguruan pencak silat berada. Persaingan yang berkembang menjadi konflik antar perguruan silat, tidak dapat dihapus tetapi hanya dapat dipersempit kemunculannya melalui kajian faktor-faktor penyebabnya, sehingga kemungkinan peristiwa kekerasan sosial yang sering diperlihatkan oleh perguruan pencak silat dapat diperhitungkan kemunculannya. Bagaimanapun kekalahan dan/atau kemenangan di dalam berlomba atau bertanding, merupakan kenyataan yang



melekat pada siapa saja yang terlibat di dalamnya sebagai akibat, dimana hal tersebut merupakan hasil-hasil dari persaingan yang tidak dapat dihindarkan oleh orang per orang ataupun kelompok seperti antar perguruan pencak silat.

Menurut kajian budaya lokal masyarakat Jawa serta mengikuti prinsip-prinsip yang telah menjadi '*ugeman*' (pedoman) secara turun-temurun, menyatakan bahwa '*gendro*' (benturan – konflik) merupakan akibat dari perbedaan-perbedaan kepentingan yang dipertentangkan secara tajam dan tidak ada pendekatan bagi upaya peredaan pertentangan terhadap perbedaan tersebut, oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Sebagai akibatnya, pertentangan yang terjadi secara tajam berkembang menjadi konflik dengan segala resiko yang menyertainya sehingga pihak-pihak yang terlibat di dalamnya mengalami hambatan dan kebuntuan di dalam melakukan berbagai kegiatan. Konflik yang terjadi seperti itu, dapat menimbulkan kekerasan sosial karena masing-masing pihak berupaya membedah hambatan dan kebuntuan yang dihadapi dengan tujuan untuk menunjukkan kekuatan masing-masing, baik secara langsung saling berhadapan dengan kekuatan fisik maupun secara tidak langsung dengan penyerangan, merusak hak milik pesaingnya. Cara-cara demikian, dapat dipastikan membawa resiko yang lebih luas yaitu terganggunya keamanan serta kenyamanan lingkungan masyarakat di sekitarnya, sehingga kerugian yang diakibatkan menjadi sangat besar berupa psikis dan fisik.

Memperhatikan '*ugeman*' (pedoman) dan kajian mengenai konflik yang terjadi, maka prinsip seperti '*andap asor*' (rendah hati), '*wang-sinawang*' (saling menyadari), '*tut wuri handayani*' (saling menguatkan), dan '*asah, asih, asuh*' (mendidik, mendampingi, membimbing) tanpa pandang bulu, seharusnya dimiliki oleh siapapun individu manusia yang selama hidupnya menjadi

warga masyarakat. Dengan memiliki dan melaksanakan prinsip-prinsip kearifan lokal budaya masyarakat Jawa tersebut, maka keselarasan dan keseimbangan di dalam berbagai hubungan yang terjadi di dalam masyarakat dapat menciptakan keteraturan serta kerukunan. Keselarasan dimaksud, terdapat di dalam falsafah budaya Jawa yang selalu diungkapkan seperti; '*urip iku kudu biso rumongso, ojo rumongso biso*' (di dalam hidup harus mampu untuk bisa merasa, bukan sebaliknya merasa bisa), '*yen siro pancen pinter ojo wani minteri*', '*yen siro nduweni kaluwihan ojo wani ngluwih*' yang intinya berarti bahwa di dalam menyikapi kehidupan ini harus dapat mengendalikan diri dan/atau tidak saling mengungguli atau tidak sombong. Selanjutnya, keseimbangan memiliki makna bahwa di dalam menjalani kehidupan ini berdasarkan pedoman seperti '*memayu hayuning bawono*' (menjaga kelestarian alam) yang harus diupayakan secara bersama-sama oleh setiap individu manusia, agar kesejahteraan dan kemakmuran hidup dapat tercapai sebagaimana kehendak kompleks manusia.

Prinsip-prinsip tersebut, merupakan pedoman di dalam menjalani kehidupan dengan segala permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan berdasarkan keselarasan serta keseimbangan yang dapat menciptakan kerukunan bagi hidup bermasyarakat. Dalam perspektif budaya Jawa ketenangan dan keselarasan sosial merupakan keadaan normal yang akan muncul dengan sendirinya, selama tidak secara sengaja terganggu atau secara sengaja diganggu. Prinsip ini adalah prinsip untuk mencegah segala bentuk dan/atau cara kelakuan yang bisa mengganggu keselarasan dan ketenangan dalam kehidupan masyarakat. Rukun berarti berusaha untuk menghindari pecahnya berbagai bentuk konflik, dan kerukunan pertama-tama tidak menyangkut suatu sikap batin atau keadaan



jiwa, melainkan penjagaan keselarasan dan keseimbangan dalam pergaulan.

Persaingan, konflik, dan kekerasan sosial merupakan sebuah rangkaian proses psikologis dan fisik yang melekat pada diri manusia selama hidupnya, tetapi setiap manusia memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya secara bebas terhadap berbagai keadaan atau peristiwa sehingga dapat memahami cara-cara mengendalikan rasa perasaan serta pemikiran tentang lingkungan dimana manusia berada. Masyarakat Jawa cenderung untuk menghindari konflik yang terbuka serta keinginan untuk selalu menjaga harmoni, sehingga jarang muncul konflik terbuka pada level intra kelompok. Dalam pandangan tersebut, motivasi manusia dalam melakukan tindakannya tidak hanya mendasarkan pada kepentingan individual, tetapi juga memperhatikan kepentingan kelompok atau masyarakat pada umumnya.

Interpretasi Data Penelitian

Setelah dilakukan analisa data penelitian sebagaimana dibahas sebelumnya, maka langkah selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap data penelitian yang telah berhasil dikumpulkan, baik melalui kuesioner, dokumentasi, observasi langsung, maupun wawancara atau *interview*. Adapun interpretasi data penelitian tersebut, dapat dikemukakan sebagaimana rincian berikut.

Secara umum, perbedaan pandangan terhadap setiap peristiwa persaingan dan terjadi di dalam masyarakat yang berupa perlombaan antar warga baik secara orang per orang maupun secara kelompok, dengan kebiasaan dan keadaan yang secara sadar memperhatikan keselarasan serta keseimbangan dapat menciptakan kerukunan. Kesadaran seperti itu, menjadi embrio bagi munculnya sikap saling menyesuaikan diri antar warga masyarakat untuk mempersempit kemungkinan munculnya perselesihan, mengingat persaingan dalam perlombaan merupakan

peristiwa yang telah menimbulkan perbedaan pandangan. Pada dasarnya, kebiasaan seperti '*andap asor*' (rendah hati), '*wang-sinawang*' (saling menyadari), '*tut wuri handayani*' (saling menguatkan), dan '*asah, asih, asuh*' (mendidik, mendampingi, membimbing) tanpa pandang bulu, merupakan prinsip-prinsip ajaran dan perilaku yang secara turun-menurun untuk upaya menjaga keselarasan dan keseimbangan kehidupan serta diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika terjadi kesepakatan-kesepakatan di dalam upaya penyelesaian, maka kepada pihak-pihak yang bersaing dapat saling memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, meskipun persaingan dalam perlombaan terus dan tetap berlangsung.

Dalam keadaan tersebut, apabila terjadi perubahan-perubahan di dalam persaingan dimana perlombaan mengarah pada pertandingan dapat dipastikan bahwa perbedaan-perbedaan pandangan dapat meluas dan membuahkan benturan (konflik) yang berkepanjangan. Perbedaan pandangan dan benturan (konflik) seolah-olah sebagai akibat dari adanya perubahan di dalam persaingan yang terjadi (perlombaan ke pertandingan), sehingga sikap '*adigang, adigung, adiguno*' (merasa diri paling dalam segalanya dibanding yang lain) dan '*sopo siro, sopo ingsun*' (membandingkan diri terhadap yang lain). Benturan atau konflik seperti terungkap, menyebabkan hambatan dan kebuntuan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara leluasa di lingkungan masyarakat sebagai akibat sikap-sikap yang menjadi pedoman, sementara upaya-upaya penyelesaian mengalami hambatan atau kebuntuan. Masing-masing pihak yang terlibat konflik memiliki harga diri (sikap '*sopo siro, sopo ingsun*') dan tidak bersedia untuk saling mengakui kekurangan atau kelebihan yang dimiliki. Secara akademik, konflik sosial merupakan gejala yang terjadi



dalam kehidupan sosial, artinya konflik tidak dapat dihindari dan akan hadir dalam setiap ruang dan waktu.

Kekerasan sosial, merupakan konflik secara terbuka bukan lagi persaingan dalam perlombaan dan/atau pertandingan tetapi indikasi terjadinya perilaku fisik lebih mengemuka serta melalui alasan untuk membedah hambatan dan kebuntuan bagi penyelesaian perbedaan tujuan yang telah ditunggu atau diharapkan kehadirannya. Menanggapi keadaan seperti itu, warga masyarakat melalui para tokoh memiliki kewajiban yang tidak ringan, bahwa teguran-teguran kepada para pihak yang terlibat sejak awal telah dilakukan agar di dalam berbagai persoalan hendaknya selalu memperhatikan keselarasan kehidupan, dan saling menahan diri. Masing-masing pihak harus dapat melupakan sikap '*sopo siro, sopo ingsun*' (membandingkan diri terhadap yang lain), serta '*adigang, adigung, adiguna*' (merasa diri paling dalam segalanya dibanding yang lain) sejauh mungkin, apabila penyelesaian persoalan yang dihadapi bersama dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya.

Telah disinggung bahwa kearifan lokal melalui ajaran dan pelaksanaannya, budaya masyarakat Jawa tentu dan pasti sangat dikenal oleh warga, baik secara orang per orang maupun kelompok yang terlibat di dalam persaingan dengan kejadian pada perlombaan dan pertandingan, dimana para pihak yang terlibat juga menjadi warga di dalamnya. Untuk itu, '*ugeman*' (pedoman) yang telah menjadi kearifan lokal tersebut, tentunya menjadi sikap dan prinsip yang harus dipegang teguh sampai kapanpun, termasuk di dalam menghadapi berbagai keadaan serta persoalan yang terjadi dan berkembang di lingkungan masyarakat. Dengan demikian keselarasan, keseimbangan, dan saling menyesuaikan diri antar warga masyarakat dapat dipertahankan, karena kerukunan hidup atau berdampingan secara damai sebagai

kehendak bersama selalu diupayakan dan diharapkan secara bersama

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam jabaran berikut diungkapkan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan analisa data penelitian sebagaimana diuraikan sebelumnya, yaitu dapat dikemukakan seperti berikut. Pada dasarnya, kearifan lokal budaya masyarakat Jawa sebagai '*ugeman*' (pedoman) telah menjadi prinsip di dalam segala kegiatan dan kehidupan sehari-hari, seperti '*wangsinawang*' (saling memperhatikan), '*asah, asih, asuh*' (mendidik, mendampingi, membimbing), '*tut wuri handayani*' (saling menguatkan), dan '*andap asor*' (rendah hati) yang berlaku tanpa pandang bulu. Prinsip-prinsip sebagaimana terdapat di dalam '*ugeman*' (pedoman), tentunya diajarkan, dinasehatkan, dan selalu dilaksanakan di dalam setiap perguruan pencak silat sebagai acuan atau pengingat bagi setiap anggota perguruan untuk bersikap dan berperilaku dalam pergaulan hidup sehari-hari. Dengan demikian, perbedaan pandangan terhadap setiap persaingan dan terjadi di dalam masyarakat yang berwujud perlombaan antar warga baik secara orang per orang maupun secara kelompok berlangsung dengan kebiasaan, keadaan, dan kesadaran untuk selalu memperhatikan prinsip-prinsip keselarasan serta keseimbangan tentunya wajar terjadi dan dapat menciptakan kerukunan.

Apabila di dalam setiap peristiwa yang terjadi merupakan persaingan mengalami perubahan (perlombaan ke pertandingan), sehingga sikap '*adigang, adigung, adiguno*' (merasa diri paling dalam segalanya dibanding yang lain) dan '*sopo siro, sopo ingsun*' (membandingkan diri terhadap yang lain), dan saling bertahan pada alasan masing-masing maka konflik antara pihak-pihak yang terlibat tidak terhindarkan. Perbedaan kepentingan yang mengakibatkan



adanya perasaan *in group* dan *out group*, yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok lain bahwa kelompoknya adalah paling baik, ideal, beradab di antara kelompok lain. Benturan atau konflik seperti terungkap, menyebabkan hambatan dan kebuntuan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara leluasa di lingkungan masyarakat sebagai akibat sikap-sikap yang menjadi pedoman, sementara upaya-upaya penyelesaian mengalami hambatan atau kebuntuan. Masing-masing pihak yang terlibat konflik memiliki harga diri dan tidak bersedia untuk saling mengakui kekurangan atau kelebihan yang dimiliki. Sementara itu, budaya masyarakat Jawa selalu berusaha untuk bersikap sederhana, tidak mau menonjolkan diri dan selalu menyesuaikan diri, perlu mendapat perhatian yang sebaik-baiknya dari pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik.

Meskipun diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat bahwa perilaku dengan cara fisik dapat menyebabkan keresahan di lingkungan masyarakat, dimana konflik yang telah diupayakan penyelesaian namun mengalami hambatan dan/atau kebuntuan. Selama menunggu penyelesaian yang terhambat tersebut, ternyata upaya mewujudkan kehendak kompleks masing-masing pihak yang harus dapat dipenuhi, menemukan kenyataan tidak leluasa dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Memperhatikan hal itu, upaya untuk memecah hambatan dan kebuntuan keadaan tersebut, memungkinkan terjadinya kekerasan sosial sebagaimana sering muncul dan warga masyarakat yang tidak tahumenuh menjadi korban dari peristiwa. Artinya, bahwa kepentingan bersama di lingkungan masyarakat yaitu berdampingan secara damai harus menjadi perhatian utama, bagi terciptanya keseimbangan dan kerukunan. Masing-masing pihak harus dapat melupakan sikap *'sopo siro, sopo*

ingsun' (membandingkan diri terhadap yang lain), serta *'adigang, adigung, adiguna'* (merasa diri paling dalam segalanya dibanding yang lain) sejauh mungkin, apabila penyelesaian persoalan yang dihadapi bersama diharapkan dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya.

Dalam ranah kearifan lokal budaya masyarakat Jawa, terjadinya konflik antar individu dan/ atau kelompok warga dapat dianggap sebagai belum memahami *'ugeman'* (pedoman) yang memuat prinsip-prinsip maupun nilai-nilai keseimbangan dan keselarasan bagi kehidupan dan hidup bersama. Selanjutnya, bahwa nilai-nilai keseimbangan dan keselarasan di dalam kehidupan mengandung maksud untuk kembali kepada jati diri setiap warga masyarakat, baik orang per orang maupun kelompok terkait posisi, peran, dan fungsi yang dimiliki di lingkungan masyarakat. Orang Jawa selalu berusaha untuk menghindari konflik terbuka serta berkeinginan untuk selalu menjaga harmoni, dimana konsep mewujudkan suatu harmoni dengan lingkungannya, oleh orang Jawa dinyatakan sebagai *'memayu hayuning bawono'*. Motivasi manusia dalam melakukan tindakannya tidak hanya mendasarkan pada kepentingan individual belaka, tetapi juga memperhatikan kepentingan kelompok serta masyarakat pada umumnya.

REFERENSI

- Endraswara(2003),
*journal.uad.ac.id/index.php/Humanitas/article/download/Vol.IX
No.1/Januari 2012*, diakses tanggal 7 Juni 2016.
- Magnis Suseno (2001),
journal.uad.ac.id/index.php/HUMANITAS/article/download/348/pdf_2,
diakses tanggal 14 Mei 2017.
- Rindra Sulistiyono, judul: Persepsi Masyarakat terhadap konflik antar oknum Perguruan Pencak Silat di kabupaten Madiun (Studi Kasus Mengenai



Konflik yang melibatkan Oknum dari Perguruan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate dan Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo di kabupaten Madiun Tahun 2013),
Sumber: muhfaishalf.blogspot.com/.../melacak-akar-konflik-antar-perguruan.htm, diakses tanggal 10 Mei 2016.

Soebijantoro, Abraham Nurcahyo, dan Yudi Hartono, judul: Rekonsiliasi Konflik Antar Perguruan Pencak Silat di Madiun (Studi Historis Sosiologis),
Sumber: dokumen.tips ›Documents, diakses tanggal 10 Mei 2016.

Setiyadi dan Kolip (2010), Teori Deprivasi Relatif,

rudidw.blogspot.com/2012/09/teori-kekerasan.html, diakses tanggal 9 Juni 2016.

Yohanes Kartika Herdiyanto dan Kwartarini Wahyu Yuniarti, judul: Budaya dan Perdamaian: Harmoni dalam kearifan lokal budaya Masyarakat Jawa menghadapi perubahan paska gempa,
journal.uad.ac.id/index.php/HUMANITAS/article/download/348/pdf_2, diakses tanggal 23 Juni 2016.